

## RINGKASAN

**MEKANISME *MONITORING* PENYELESAIAN TRANSAKSI PERSEDIAAN MELALUI APLIKASI MONSAKTI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) DENPASAR**, Nanda Apriliani, NIM D42190566 tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Totok Iman Santoso, S.E (Ketua Pembimbing Lapangan) dan Dessy Putri Andini, S.E., M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. KPPN Denpasar merupakan KPPN tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Denpasar selain melaksanakan tugas, juga mempunyai fungsi salah satunya yaitu *monitoring*. Salah satu transaksi yang perlu dilakukan *monitoring* yaitu transaksi persediaan. *Monitoring* penyelesaian transaksi persediaan perlu dilakukan karena berdasarkan data yang di dapat dari aplikasi MonSAKTI bahwa transaksi persediaan banyak mengalami permasalahan sehingga berdampak terhadap ketidaksesuaian antara Berita Acara Serah Terima (BAST) atau kuitansi persediaan dengan keadaan fisik barang.

Proses *monitoring* ini diawali dengan mengunduh data persediaan yang belum terselesaikan dari satuan kerja pada aplikasi MonSAKTI, kemudian pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengunduhan data tersebut yang menghasilkan *output* berupa berkas dua rangkap. Rangkap pertama diberikan Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk arsip. Kemudian rangkap kedua akan diberikan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, nantinya akan membuat surat tindaklanjut yang ditujukan kepada satuan kerja. Hal tersebut bertujuan agar satuan kerja dapat segera melakukan penyelesaian transaksi persediaan. Setelah itu satuan kerja menyelesaikan transaksi tersebut.